

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Pembangunan ekonomi pada esensinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kondisi tersebut maka diperlukan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukan satu – satunya tujuan utama, perlu dipertimbangkan juga persoalan distribusi pendapatan. Sebab negara yang semata – mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pendistribusian pendapatan tersebut akan memunculkan ketimpangan pada distribusi pendapatan.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Kuncoro dikutip Arham, 2014:24).

Ketimpangan merupakan masalah yang sangat sulit dimusnahkan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan pasti selalu ada, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat

ketimpangan yang terjadi pada masing – masing wilayah tersebut. Ketimpangan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan dalam hal pendapatan daerah dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan – kawasan kumuh ditengah kota besar, serta munculnya pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan dipedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang telah terjadi.

Terjadinya ketimpangan akan membawa implikasi ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya, guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial, dan solidaritas serta ketimpangan ekonomi dipandang tidak adil. Hal ini juga terjadi dalam kasus Sumatera Selatan yang terbagi menjadi 17 Kabupaten/Kota, dimana masing-masing daerahnya mengalami ketimpangan. Ada daerah yang ketimpangannya meningkat, berfluktuasi, dan ada pula yang menurun. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat.

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat tersebut, para ilmuwan lazim menggunakan perkembangan angka indeks *Gini Ratio* dari satu periode ke periode lainnya. Koefisien Gini merupakan salah satu model untuk mengukur derajat disparitas pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi koefisien gini di suatu wilayah, semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut yang menunjukkan bahwa adanya pendapatan yang tidak merata antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi yang tidak terlepas juga dari permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerataan dalam pendapatan merupakan hal yang penting untuk diamati, karena pemerataan tersebut merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga diharapkan dalam proses pembangunan yang terjadi di suatu daerah khususnya pada beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan distribusi pendapatan, dengan memaksimalkan sektor – sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan di setiap daerahnya.

**Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Rasio Gini Tahun 2017 – 2021 di Sumatera Selatan**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )	Dana Alokasi Umum ( $X_2$ )	Rasio Gini ( $Y$ )
2017	3 031 633 624,30	1 697 897 817,00	0,36
2018	3 528 010 712,18	1 697 762 032,00	0,36
2019	3 494 510 853,25	1 743 742 960,00	0,33
2020	3 375 100 984,84	1 568 602 615,00	0,34
2021	3 865 463 033,09	1 563 041 287,00	0,34

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1, dalam lima tahun terakhir dapat diketahui bahwasanya jumlah pendapatan asli daerah Sumatera Selatan pada tahun 2017 berjumlah Rp 3.031.633.624,30 dan mengalami peningkatan pada tahun

berikutnya yang bisa dilihat dalam tabel, pada tahun 2018 pendapatan asli daerah berjumlah sebesar Rp 3.528.010.712,18. Namun pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya yaitu 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 3.494.510.853,25 dan Rp 3.375.100.984,84. Pada tahun 2021 pendapatan asli daerah Sumatera Selatan mulai mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan dengan jumlah sebesar Rp 3.865.463.033,09. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Sumatera Selatan berhasil untuk meningkatkan jumlah pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana alokasi umum di Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan juga penurunan. Khususnya dalam tiga tahun terakhir yaitu 2019 hingga 2021, dana alokasi umum terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah dana alokasi umum sebesar Rp 1.743.742.960,00, lalu pada tahun 2020 sebesar Rp 1.568.602.615,00, dan pada tahun 2021 dana alokasi umum di Sumatera Selatan berjumlah sebesar Rp 1.563.041.287,00.

Indeks rasio gini di Sumatera Selatan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan rasio sebesar 0,33%. Namun pada dua tahun berturut – turut rasio gini mengalami peningkatan dengan rasio sebesar 0,34%. Artinya selama periode tersebut pendapatan per kapita masyarakat semakin timpang. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang relatif berbeda serta kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya di masa pandemi *Covid-19*.

Hal ini memperjelas bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah merupakan suatu masalah universal, karena pada tingkat apapun ketimpangan selalu ada, dikarenakan oleh perbedaan potensi – potensi ekonomi yang dimiliki masing – masing wilayah. Meskipun demikian, ketimpangan distribusi pendapatan bersifat “alamiah” dan universal yang tidak dapat dihindari namun kondisi tersebut dapat dirubah melalui proses pembangunan. Kusnetz sudah dapat membuktikan hal itu, dalam analisis pola – pola pertumbuhan historis di negara – negara maju ditemukan bahwa pada tahap – tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun dalam tahap – tahap berikutnya hal itu akan membaik (Todaro, 2004:129).

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara wilayah lebih berkembang dan wilayah kurang berkembang maka diperlukan kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan itu salah satunya diantaranya mendorong pengembangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan dirinya sesuai potensi dan preferensi masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan sejak tahun 2001. Melalui kebijakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya masing – masing (Sjafrizal, 2008:124).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah guna mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada daerah – daerah di Indonesia. Beberapa sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dan Bagi Hasil, serta Pinjaman Daerah dan Lain – lain Penerimaan yang Sah.

Salah satu peran dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah serta pemberian dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan sebagainya agar dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan pemerataan antar daerah sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikurangi.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Hal ini jelas karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat (Sjafrizal, 2008:124).

Maka dengan kewenangan dari otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat menampung berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat guna menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan proses pembangunan di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting sebagai tolak ukur dari pelaksanaan desentralisasi, dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi.

Pemberian dana alokasi umum oleh pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antardaerah. Dana alokasi umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa dana tersebut lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Dengan begitu diharapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembangunan ekonomi daerah dapat meningkat dan akhirnya ketimpangan dapat berkurang (Sjafrizal, 2008:124).

Namun, teori di atas tidak selalu searah dengan data yang ada, dapat dilihat dari tabel, pada tahun 2019 dan 2020 jumlah Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, namun Indeks Rasio Gini pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Dan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan akan tetapi indeks Rasio Gini tetap berada di angka tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan juga penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada dimana seharusnya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Ketimpangan Distribusi Pendapatan akan menurun dan juga jika Dana Alokasi Umum naik maka Ketimpangan Distribusi Pendapatan juga akan ikut menurun. Hal ini jelas bertentangan dengan teori hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan**

## **Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2021”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 – 2021 baik secara simultan dan parsial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 – 2021 baik secara simultan dan parsial.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Baturaja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah diProvinsi Sumater Selatan dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk mengurangi Ketimpangan Distribusi Pendapatan yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2021.